“ LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023”

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan. LKIP BPPPPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada BPPPPD dalam melaksanakan urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan Renstra BPPPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan sasaran strategis yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. LKIP yang disampaikan telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dar Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan hasil kerjasama pelaksana kegiatan di lingkup BPPPPD Kabupaten Flores Timur.

Laporan ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun tentunya tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mencerminkan kinerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

Larantuka, Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur,

Apolonia Gerebima, S.E, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690718 199703 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……i

DAFTAR ISI……ii

IKHTISAR EKSEKUTIF……iii

BAB I : PENDAHULUAN……I-.1

A. LATAR BELAKANG……I-.1
B. DASAR HUKUM……I-2
C. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP……I-4
D. LINGKUNGAN STRATEGIS …… I-5
E. ISU STRATEGIS……I-14
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN…… I-14

BAB II :PERENCANAAN KINERJA……II-1
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI
B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)…… II-5
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN……II-9

BAB III :AKUNTABILITAS KINERJA……III-1

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI……III-2
B. REALISASI ANGGARAN……III-32

BAB IV :PENUTUP……III-38

LAMPIRAN:
PERJANJIAN KINERJA

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan 4 Program, 18 kegiatan dan 64 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp**. **5.562.544.47** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.302.202.267.** Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur dapat di kategorikan tinggi. Hal ini di buktikan bahwa sebagian besar capaian dari 4 sasaran relatif indikator kinerja berada di interval 90-100%.

Kondisi ini mengambarkan bahwa tingkat keberhasilan BPPPPD sebagai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dinilai baik. Untuk pencapaian sasaran, meskipun secara umum menunjukan presentase yang baik tetapi masih harus diperkuat dengan upaya membangun koordinasi lintas bidang, dan lintas sector agar target kinerja dapat tercapai..

Hal tersebut cukup esensial mengingat koordinasi memegang peranan penting dalam urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah sebagai upaya mewujudkan keberhasilan prioritas pembangunan. Tentunya hal ini menjadi catatan penting bagi BPPPPD Kabupaten Flores Timur untuk semakin memperbaiki kualitas kinerja bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Larantuka, Januari 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,

Apolonia Corebima, S.E, M.Si.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Pemerintah merupakan gambaran untuk terselenggaranya "*Good Governance*" yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah telah berlangsung secara berdaya guna,berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Tuntutan adanya Laporan Kinerja ini sesuai Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan tersebut diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, dan responsive terhadap masyarakat. Selain itu LKIP menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPPPPD Kabupaten Flores Timur disusun dengan memperlihatkan rencana strategis BPPPPD Kabupaten Flores Timur yang telah dilaksanakan dalam semangat adminstrasi negara modern yang andal, demokratik, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat, baik keberhasilan maupun kegagalannya serta memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur
14. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ;
15. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 03 Tahun 2023)
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 nomor 22)

C. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP, maka Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1) Mendorong Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2) Menjadikan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3) Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

D. LINGKUNGAN STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat Flores Timur dalam pendekatan lokal, nasional, dan global.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Flores Timur memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kabupaten Flores Timur adalah Lembaga Teknis Daerah, yang berfungsi sebagai perencana pembangunan. Sebagai instansi teknis Perencanaan BPPPPD biasanya memadukan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar -benar dari bawah *(bottom-up approach)* dengan kebijakan pembangunan Kabupaten, kebijakan pembangunan Propinsi, dan kebijakan pembangunan Nasional.

Berdasarkan peraturan perundang- undanganyang berlaku, penyusunan rencana dapat dilakukanmelalui pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down.* Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan dapatmemenuhi kaidah penyusunan rencana yang

sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; termasuk aspek kepemilikan rencana (*sense of ownership*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, BPPPPD sebagai perencana pembangunan daerah yang meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah disingkat RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah mapun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
d. RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan b berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 78 tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPPPD Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi

a. Pengoordinasian Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi penyususnan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,RPJMD, dan RKPD,sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah serta sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Propinsi dan Kabupaten.
b. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah penelitian dan pengembangan
c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
e. Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
f. Pengelolaan administrasi Badan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

2. Sumber Daya Manusia BPPPPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPPPPD memiliki sumber daya manusia sebagai berikut: Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BPPPPD Kabupaten Flores Timur, akhir tahun 2023 sejumlah 24 orang, yang terdiri dari 13 laki-laki dan 11 perempuan. Dilihat dari sisi kapasitas dan profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan data eksisting tingkat pendidikan aparatur, sebagaimana tergambar pada tabel berikut Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah PNS/P3K BPPPPD Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Pendidikan dan Eselonering
Tahun 2023

No	Eselon	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai	Ket
		SD/SLTA/SMA	D3/D2/D1	S1	S2		
1	Eselon II	-	-	-	1	1	
2	Eselon III	-	-	1	3	4	
3	Eselon IV	-	1	1	-	2	
4	Fungsional		1	10	1	12	10 orang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional
5	Non Eselon	5	-	-	-	5	
	Jumlah	5	2	12	5		

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPPPD Kabupaten Flores Timur,2023

Tabel 1.2
Jumlah PNS/P3K BPPPPD Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan
Tahun 2023

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	-	-	1	4	5
2	S1	-	-	11	1	12
3	D3/D2/D1	-	-	2	-	2
4	SMA	-	5		-	5
	Jumlah	-	5	14	5	24

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPPPD Kabupaten Flores Timur,2023

Dari tabel dapat diketahui bahwa komposisi dan kapasitas aparatur pada BPPPPD Kabupaten Flores Timur beum memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD sebagai aparatur perencana. Selain secara jumlah masih mengalami kekurangan, secara kapasitas juga belum memadai karena sebagian besar pejabat fungsional belum mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.

3. Kondisi Asset dan Sarana Prasarana Kantor BPPPPD

Ketersediaan asset dan sarana prasarana pada kantor BPPPPD mendukung aktifitas perkantoran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Kondisi Asset/Inventaris Kantor BPPPPD

a. Inventaris Barang A

TANAH

No. Urut	Jenis Barang/Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Penggunaan
					Sertifikat		
					Nomor	Tanggal	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4947	1994	Kel. PTW. Bao Kec. Larantuka	AE 382 784 /	16-06-1994	Kantor BP4D

b. Inventaris Barang B

PERALATAN DAN MESIN

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	Warna Biru	2015	Rusak Berat	3
2	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	Warna Biru	2015	Rusak Berat	19
3	1.3.2.10.002.004.004	Modem	TP Link	2015	Baik	2
4	1.3.2.02.001.001.001	Sedan	Toyota / Kijang Innova	2012	Baik	1
5	1.3.2.02.001.001.006	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	FORD / Ranger Double Cab Bage 2	2015	Baik	1
6	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / NF 100 SLD	2007	Baik	1
7	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / NF 100 SLD	2007	Baik	1
8	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro GL160 D	2008	Baik	1
9	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	2008	Baik	1
10	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	2008	Baik	1
11	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro GL160 D	2008	Baik	1
12	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / NF125TR M/T	2012	Baik	1
13	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / NF125 TR M/T	2012	Baik	1
14	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / NF125TR M/T	2012	Baik	1
15	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / NF125TR M/T	2012	Baik	1

16	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / NF125TR M/T	2012	Baik	1
17	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda CB / CB15A1RRF M/T	2015	Baik	1
18	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / AFX.12U21C08 M/T	2015	Baik	1
19	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / AFX12U21C08 M/T	2015	Baik	1
20	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / AFX.12U21C08M/T	2015	Baik	1
21	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / AFX12U21C08 M/T	2015	Baik	1
22	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	-	2003	Baik	4
23	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	-	2008	Baik	2
24	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	-	2008	Baik	1
25	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	Biasa	1999	Kurang Baik	1
26	1.3.2.05.001.004.004	Rak Kayu	-	2017	Baik	3
27	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	Brother	2010	Rusak Berat	1
28	1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	Biasa	2007	Baik	1
29	1.3.2.05.001.005.023	Overhead Projector	Infokus	2012	Baik	1
30	1.3.2.05.001.005.023	Overhead Projector	Infocus / IN116	2013	Baik	1
31	1.3.2.05.001.005.023	Overhead Projector	EPSON EB-W51	2021	Baik	2
32	1.3.2.05.001.005.053	Focusing Screen/Layar LCD Projector	-	2007	Baik	1
33	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	-	2009	Baik	8
34	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	-	2017	Baik	12
35	1.3.2.05.002.001.004	Kursi Kayu	-	2017	Baik	12
36	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	-	2017	Baik	4
37	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	-	2018	Baik	3
38	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	Malvin	2013	Baik	4
39	1.3.2.05.002.001.035	Bangku Tunggu	Krom	2017	Baik	2
40	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	sofa sudut	2006	Baik	1
41	1.3.2.05.002.001.050	Meubelair Lainnya	-	1993	Baik	2
42	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	Panasonic	2010	Baik	1
43	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	Panasonic	2013	Baik	5
44	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	Panasonic	2014	Baik	2
45	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	LG	2015	Baik	3
46	1.3.2.05.002.005.011	Treng Air/Tandon Air	Profil tank	2015	Rusak Berat	1
47	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	tens	1999	Rusak Berat	1
48	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	NOISE	2021	Baik	1
49	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	Tanaka	2021	Baik	1

50	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	Miyako	2015	Baik	1
51	1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	kain blackout	2019	Baik	66
52	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Profil Tank	2007	Baik	1
53	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	kain Polyester katun	2019	Baik	10
54	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	2005	Baik	1
55	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2005	Baik	3
56	1.3.2.05.003.001.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2003	Baik	4
57	1.3.2.05.003.001.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1/2 Biro	2017	Baik	5
58	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	2003	Baik	4
59	1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2017	Baik	5
60	1.3.2.05.003.006.005	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	Sudut	2017	Baik	1
61	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Arsip	2017	Baik	2
62	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	2017	Baik	4
63	1.3.2.05.001.004.004	Rak Kayu	-	2015	Baik	2
64	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	2017	Baik	1
65	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	DELTA / vx1000 VA	2017	Baik	3
66	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	Soni DSC S 500 / Camera Digital	2007	Rusak Berat	1
67	1.3.2.06.002.001.003	Pesawat Telephone	-	2009	Rusak Berat	1
68	1.3.2.06.002.001.010	Facsimile	Panasonic	2003	Rusak Berat	1
69	1.3.2.06.003.010.006	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya (dst)	Wingsat	2008	Rusak Berat	1
70	1.3.2.06.003.047.002	Genset	Falkon / FX5000 EW	2017	Baik	1
71	1.3.2.10.001.001.004	Internet	indihome	2007	Baik	1
72	1.3.2.10.001.001.004	Internet	indihome	2007	Baik	1
73	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	Acer 605	2014	Baik	1
74	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	Intel	2017	Baik	2
75	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	acer / core i7-6700	2017	Baik	3
76	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	acer / aspire C20-830	2019	Baik	2
77	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Toshiba / Satelite C840	2013	Rusak Berat	1
78	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Accer / Ultrabook S3-391	2013	Rusak Berat	1
79	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Accer / Ultrabook S3-391	2013	Baik	1
80	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Toshiba / Satellite C 40-A	2014	Baik	3
81	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Assus	2017	Baik	4
82	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Assus	2017	Rusak Berat	1
83	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Acer	2018	Baik	2

84	1.3.2.10.001.00 2.002	Lap Top	acer / one 14Z476	2019	Baik	5
85	1.3.2.10.001.00 2.002	Lap Top	acer / one 14Z476	2019	Baik	1
86	1.3.2.10.001.00 2.002	Lap Top	asus / asus tufgamin	2019	Baik	1
87	1.3.2.10.001.00 2.002	Lap Top	lenovo V14	2021	Baik	3
88	1.3.2.10.001.00 2.002	Lap Top	Hp	2022	Baik	1
89	1.3.2.10.001.00 2.002	Lap Top	Acer	2022	Baik	1
90	1.3.2.10.002.00 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon / iP 2770	2017	Baik	1
91	1.3.2.10.002.00 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon / Mp 287	2017	Rusak Berat	1
92	1.3.2.10.002.00 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	canon / pixma ip 2770	2019	Baik	6
93	1.3.2.10.002.00 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON EB-W51	2021	Baik	5
94	1.3.2.10.002.00 3.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	epson wokforce	2019	Baik	1
95	1.3.2.10.002.00 3.007	External	WESTEM / DIGITAL	2017	Baik	1
96	1.3.2.05.002.00 1.033	Kursi Biasa	-	2000	Baik	5
95	1.3.2.05.002.00 4.006	Kipas Angin	maspion	2005	Baik	2
97	1.3.2.05.002.00 1.030	Kursi Rapat	-	2006	Rusak Berat	1
98	1.3.2.05.002.00 1.030	Kursi Rapat	-	2006	Baik	1
99	1.3.2.05.002.00 1.030	Kursi Rapat	-	2012	Baik	6
100	1.3.2.05.002.00 1.036	Kursi Lipat	Warna Merah	2015	Baik	6
101	1.3.2.05.002.00 1.030	Kursi Rapat	-	2018	Baik	25
102	1.3.2.05.003.00 4.007	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	Matrix / Biru	2020	Baik	1
103	1.3.2.05.003.00 4.007	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	Matrix / Biru	2020	Baik	76
Jumlah						**414**

c. Inventaris Barang C
GEDUNG DAN BANGUNAN

No. Urut	Jenis Barang/Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Ket
1	*2*	*3*	*4*
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Kantor BP4D
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	Pagar dan Penataan Taman

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021, sebagai berikut :

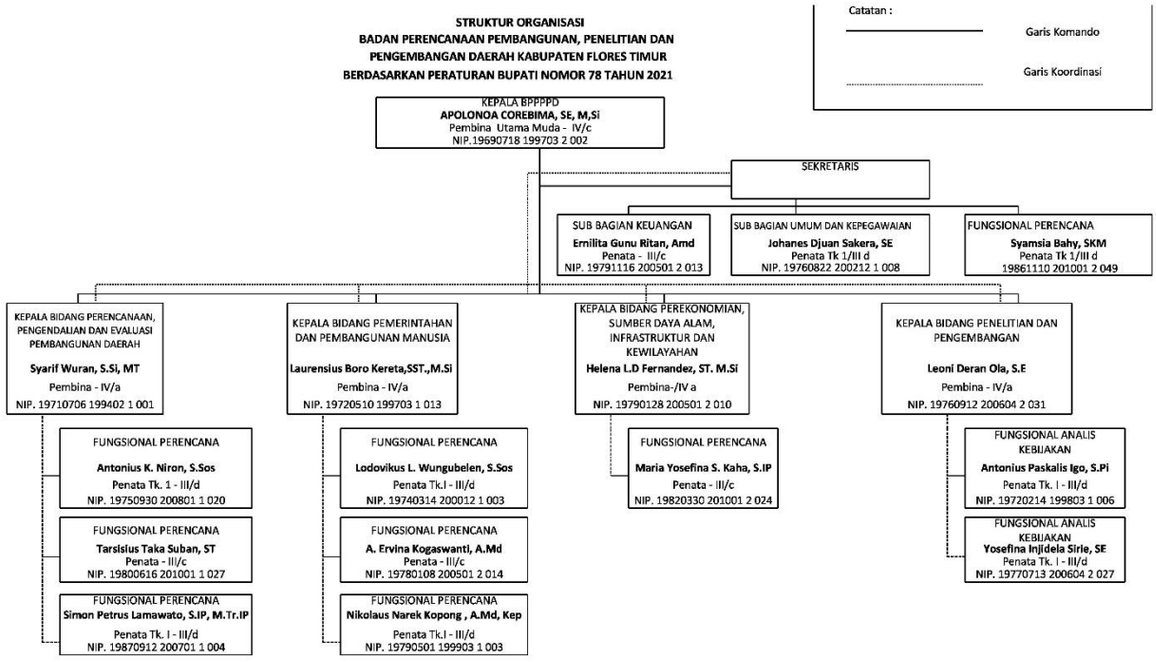

E. ISU STRATEGIS

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaran tugas pokok dan fungsinya yang melekat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur. Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

Adapun isu penting terkait penyelenggaraan fungsi yang melekat pada BPPPPD adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya konsistensi antar dokumen perencanaan
2. Rendahnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi
3. Lemahnya fungsi penelitian dan pengembangan Daerah

F. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini menunjukan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selama tahun 2023. Capaian kinerja 2023 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2023.

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 merupakan jabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2023-2026 Indikator yang ditetapkan atas Rencana Kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. DASAR HUKUM

C. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

D. LINGKUNGAN STRATEGIS

E. ISU STRATEGIS

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II :PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

B. PENETAPAN IKU

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

BAB III :AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV :PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan penjabaran lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur, sehingga setiap tahapan dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur 2023 – 2026. RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan periode pembangunan terakhir dalam rangka pencapaian visi daerah dua puluh tahunan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan pada periode lima tahunan terakhir dalam rangka pencapaian visi RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, yakni

> ***"Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing".***

Berdasarkan visi tersebut, sasaran pembangunan jangka menengah tahap keempat/ terakhir yang ingin dicapai adalah :

1) Terwujudnya jaminan kehidupan bermartabat;
2) Meningkatnya kemampuan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan;
3) Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali;
4) Meningkatnya kualitas SDM;
5) Tersedianya tenaga kerja produktif di sektor usaha ekonomi daerah;
6) Meningkatnya infrastruktur dasar dan transportasi untuk mendukung perekonomian daerah;
7) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
8) Meningkatnya kesejahteraan sosial.

Mengacu pada sasaran pembangunan di atas, serta memperhatikan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi, kondisi faktual,

permasalahan dan isu-isu strategis maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

1. Tujuan Dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut:

1. 1 Terwujudnya Daya Saing Daerah.

Pelaksanaan pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi potensi dan sumber daya daerah yang dimiliki dalam rangka terwujudnya daya saing daerah melalui sasaran pembangunan:

a. Terwujudnya daya saing ekonomi, yang dapat diukur dari pencapaian kinerja: Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan; Pertumbuhan PDRB; Laju inflasi daerah; Jumlah investor; Jumlah wisatawan; dan Indeks Desa Membangun.
b. Terwujudnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), yang dapat diukur dari pencapaian kinerja: Rata-rata lama sekolah; Angka harapan lama sekolah; Angka *Drop Out*; Rasio lulusan Sarjana; Magister dan Doktor; Angka Melek Huruf; Angka Harapan Hidup; Angka Kesakitan; dan Tingkat pengangguran terbuka.
c. Terwujudnya daya saing infrastruktur, yang dapat diukur dari pencapaian kinerja: tingkat kemantapan jalan; Sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik; Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik; Persentase jaringan irigasi; Akses air minum aman; Akses sanitasi aman an layak; serta Persentase jaringan intra pemerintah.

1.2 Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan Flores Timur diarahkan pada pemanfaatan tata ruang agar dapat berdayaguna, dan peningkatan infrastruktur dasar yang terencana, selaras, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan ditandai dengan tercapainya sasaran pembangunan :

a. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata, yang diukur dari pencapaian kinerja: Tingkat Kemiskinan.
b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, yang diukur dari pencapaian kinerja: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

*1.3 Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas***.**

Pembangunan Flores Timur ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Flores Timur yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta adaptif, inovatif dan terampil dalam rangka terwujudnya manusia yang berkualitas melalui sasaran pembangunan:

a. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat, yang dikur dari pencapaian kinerja: APK dan APM PAUD/TK; APK dan APM SD/MI/ Paket A; APK dan APM SMP/ MTs/Paket B; Angka melanjutkan Pendidikan SD ke SMP; dan Angka melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA.
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang diukur dari pencapaian kinerja: Indeks Keluarga Sehat; Angka Kematian Ibu; Angka Kematian Bayi; Prevalensi *Stunting;* dan Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua).
c. Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan layanan Keluarga Berencana, yang diukur dari pencapaian kinerja: Angka Kelahiran Total.
d. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, yang diukur dari pencapian kinerja: Persentase PMKS.
e. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak, yang diukur dari pencapaian kinerja: Indeks Pembangunan Gender; Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan; dan Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak.
f. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, yang diukur dari pencapaian kinerja: Persentase organisasi

pemuda yang aktif; dan Persentase wirausaha muda.

1.4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah yang handal harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintahan Flores Timur yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* ditujukan pada terwujudnya tata kelola pemerintah pemerintahan yang baik melalui sasaran pembangunan:

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang diukur dari pencapaian kinerja: Indeks Kepuasan masyarakat; Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan; Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah; Opini BPK, Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan; Persentase keterlibatan masyarakat dalam Pemilu; Persentase OPD yang terhubung dengan website Pemda; Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD; Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; Cakupan penanganan konflik sosial, Cakupan penanganan kriminalitas; Cakupan penanganan bencana; Jumlah hasil kelitbangan; Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah; dan Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa.

Tabel. 2.1 Kaitan Tujuan dan Sasaran RPD terhadap Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijkan pada BPPPPD

VISI : "*Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing*

TUJUAN DAN SASARAN 4: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD	Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan	Membangun sistem perencanaan dan peganggaran terpadu
	Meningkatnya	Peningkatan	Penyusunan dokumen

	partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan	perencanaan yang berkualitas (Target dan Sasaran jelas, terukur) dan Partisipatif dan tepat waktu
	Meningkatnya hasil kelitbangan	Penguatan fungsi Litbang Daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM kelitbangan
	Meningkatnya kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		

Tujuan pembangunan yang diemban oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur yakni "*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik* " difokuskan pada bidang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, sesuai tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur.

B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sebagai salah satu upaya untuk mngetahui kinerja BPPPPD, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Bedasarkan hasil evaluasi SAKIP dari Kemenpan RB dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan pemerintahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tanggal 17 Oktober tahun 2023 maka IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur menunjang pada Indikator Kinerja Predikat SAKIP (khususnya nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja).

Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur yang diturunkan dari Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tersebut dan berdasarkan lampiran SK Kepala

BPPPPD nomor BPPPPD.188.UP/15/Skrt/2023 tanggal 19 Oktober tahun 2023, yaitu:

1. Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)
2. Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)
3. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)
4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%) :

Tabel. 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BPPPPD KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 – 2026

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASONAL dan FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
1	Meningkatnya penjabaran program RPJMD ke RKPD	Persentase penjabaran program RPJMD ke RKPD *(%)*	Jumlah program yang diakomodir dalam RKPD tahun berkenaan dibagi jumlah program yang ada dalam RPD atau RPJMD tahun berkenaan; $\frac{Jumlah\ program\ RKPD\ tahun\ berkenaan}{jumlah\ program\ RPJMD\ atau\ RPD\ yang\ harus\ dilaksanaan\ tahun\ berkenaan} \times 100$
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	Jumlah utusan yang hadir dibandingkan dengan jumlah utusan yang diundang pada musrembang kabupaten. $\frac{Jumlah \text{ utusan yang hadir pada musremban kabupaten}}{\text{Jumlah utusan yang diundang pada musrembang kabupaten}} \times 100$
3	Meningkatnya hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	$\frac{Jumlah \text{ kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam } renja\ perangkat\ daerah} \times 100$ Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASONAL dan FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
			dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan
4	Meningkatnya kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibandingkan dengan jumlah seluruh kebijakan inovasi yang diusulkan $\frac{\textit{Jumlah}\text{ kebijakan inovasi }\textit{inovasi yang diterapkan}}{\text{Jumlah kebijakan inovasi yang diusulkan}} \times 100$

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Berdasarkan IKU tersebut maka Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD	Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	100
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	50
4	Meningkatnya kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	100

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPPPPD.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026 dan Renstra BPPPPD tahun 2023-2026 maka BPPPPD menjalankan 3 program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang diselenggarakan oleh Pemerintah saat ini adalah perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang mengemban amanah dari Bupati Flores Timur dalam urusan perencanaan, penelitian pengembangan daerah berkewajiban mempertanggung jawabkan atas anggaran belanja yang dialokasikan untuk terlaksananya berbagai program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2023-2026 dan Rencana Kinerja tahun 2023 dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja.

Sebagai landasan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja memberi informasi tentang tingkat pencapaian target indikator dari masing-masing sasaran yang telah disepakati oleh Kepala BPPPPD selaku penerima amanah dengan Bupati Flores Timur sebagai pemberi amanah sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen PK dengan realisasi.

Pengukuran atas capaian kinerja tersebut, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.
2. Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\textit{Capaian indikator kinerja} = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\%$$

3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
4. Predikat capaian kinerja mempergunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut : (lihat Tabel 3.1)

Tabel.3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Indikator kinerja utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian IKU Kabupaten dimana berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tanggal 27 November tahun 2023 pada komponen perencanaan kinerja mendapat nilai 19,70. Hal ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2022 dengan nilai 19,50.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama BPPPPD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian IKU Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indiketor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD	Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	100	93,6	93,6
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100
3	Meningkatnya pemafaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	50	50	100
4	Meningkatnya kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	100	57,14	57,14
			Rata-rata capaian		88

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator rata – rata capaian seluruh indicator adalah sebesar 88% dengan kategori **Tinggi.** Walau demikian ada 2 indikator yang belum mencapai target yaitu Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD dan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

2. Evaluasi Capaian Sasaran Strategis Tahun Ini dan Tahun Lalu

Sasaran 1:

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 93,6 % untuk tahun 2023 dengan peringkat kinerja sangat tinggi. .

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 1 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3 Realisasi dan Target Sasaran 1 Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN	REALISASI TAHUN	% CAPAIAN

			2023	2023	TAHUN 2023
1	Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD	88,79%	100 %	93,6%	93,6%

Realisasi kinerja untuk indicator sasaran 1 ini didapat dari konsistensi program-program pembangunan daerah yang diakomodir dalam RKPD tahun berkenaan dibandingkan dengan program yang ada dalam RPD atau RPJMD tahun berkenaan. Dari data dapat diketahui bahwa jumlah program pada RPD periode tahun 2023 sebanyak 125 program, yang kemudian mengalami perubahan pada perubahan RKPD tahun 2023 menjadi 117 program. Kondisi ini diakibatkan karena adanya keterbatasan anggaran dan penentuan skala prioritas dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah serta adanya penyesuaian terhadap kebijakan pusat.

Walaupun demikian, capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena sudah semakin ditingkatkan upaya menjalin koordinasi dan kerjasama yang terus menerus baik secara lintas bidang maupun secara lintas sektoral .

Berdasarkan tingkat capaian sasaran tersebut, maka pencapaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2023 ini BPPPPD melaksanakan program yakni Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan didukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Sasaran 2:

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan diatur secara bertahap, hal ini menunjukan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat parsipatif, dimana pemerintah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu aplikasinya melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten,/kota, provinsi,

regional/wilayah dan pusat. Forum musyawarah ini merupakan media yang cukup efektif untuk menampung aspirasi masyarakat yang sekaligus juga menjadi media pemberdayaan dan partisipasi masyarakat selaku subjek dan objek dalam proses pembangunan.

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan 1 (satu) indikator kinerja yakni persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % untuk tahun 2023 .

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.4 Relisasi dan Target Sasaran 2 Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	%CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	% CAPAIAN TAHUN 2023
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100 %	100 %	100%	100%

Pencapaian indikator kinerja sasaran dapat dijelaskan tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator kinerja presentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat pada kehadiran utusan yang mewakili masyarakat pada musrembang kabupaten dengan realisasi sebesar 100 % dari target 100%. Hal ini dilihat pada jumlah kehadiran peserta dalam musrembang kabupaten sesuai dengan undangan. Target utusan kecamatan yang hadir adalah 94 orang, dengan total kehadiran 94 orang, sedangkan untuk utusan tokoh masyarakat, LSM/NGO, Akademisi, Lembaga Profesi tingkat kabupaten dari 20 peserta yang diharapkan hadir, total kehadiran 33 orang. Capaian indikator ini sama dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan tingkat capaian sasaran tersebut, maka pencapaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tahun anggaran 2023, didukung dari Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,.

Sasaran 3:

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dengan 1 (satu) indikator yakni persentase pemanfaatan hasil kelitbangan mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 %. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 3 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.5 Realisasi dan Target Sasaran 3 Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	%CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	% CAPAIAN TAHUN 2023
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	50	50	100

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Berdasarkan evaluasi terhadap indicator ini capaian kinerja persentase pemanfaatan hasil kelitbangan mencapai 100 %. Capaian ini jika dibandingkan dengan tahun lalu maka capaiannya 100%, Hal ini dikarenakan ada kegiatan penelitian pada tahun 2022 yakni pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul kajian Evaluasi Kebijakan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 kerjasama dengan pihak Universitas Nusa Cendana Kupang. Hasil kajian ini digunakan tahun ini untuk penyusunan dokumen Rancangan awal RPJPD 2025-2045.

Untuk tahun 2023, capaian pada indicator ini tetap 100%. Kondisi ini dikarenakan ada 2 penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2023 yakni kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dengan judul Studi kelayakan RS Pratama Solor serta kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dengan judul Grand Design Pemetaan Kawasan Food Estate di Kabupaten Flores Timur. Penelitian yang telah dimanfaatkan yakni Studi

kelayakan RS Pratama Solor yang telah digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan DAK untuk RS Pratama Solor pada tahun 2024.

Sasaran 4:

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka realisasi sebesar 57,14% untuk tahun 2023.

Tabel. 3.6 Realisasi dan Target Sasaran 4 Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	% CAPAIAN TAHUN 2023
1	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	42,85	100	57,14	57,14

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Berdasarkan tingkat capaian sasaran terkait, maka pencapaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tahun anggaran 2023 baru mencapai 57,14 % dimana terdapat 8 inovasi yang diusulkan menjadi inovasi daerah berdasarkan SK Bupati Flores Timur nomor 321 tahun 2023 tentang Penetapan Inovasi Daerah per tanggal 21 November tahun 2023. Untuk tahun 2022 terdapat 6 inovasi yang diusulkan menjadi inovasi daerah. Dari 14 inovasi yang sudah diusulkan menjadi inovasi daerah tersebut, terdapat 8 inovasi yang sudah mulai diterapkan dan direplikasi. Capaian kinerja ini didukung dengan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

Tahun 2023, di Kabupaten Flores Timur terdapat 14 (empat belas) inovasi yang terdiri dari inovasi bidang pemerintahan dan pelayanan publik sebanyak 8 (delapan) inovasi, sedangkan pemberdayaan dan peran

serta masyarakat sebanyak 6 (enam) inovasi dapat dirincikan sebagai berikut :

- **BIDANG PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

1. **KRIS BEL – Kelurahan Wisata Balela**

   Pemanfaatan Taman Kota Felix Fernandez dan Pante Uste dikelola secara baik oleh Kelompok UMKM dan Pokdarwis sebagai sarana rekreasi bersama keluarga di wilayah kelurahan wisata balela yang bersih dan asri, Di samping itu masyarakat Kelurahan Balela dapat memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan tetap dan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, berbagai Program Pemberdayaan dan Pembangunan dapat dilaksanakan melalui anggaran yang dikelola Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

2. **BAPEDA (Bapak Peduli Anak) : Kecamatan Lewolema**

   Meningkatkan peran serta/keterlibatan Ayah/Bapak/kaum laki laki dalam kegiatan mengikuti tingkat tumbuh dan kembang anak.melalui pengkajian yang lebih leluasa dari nakes, pemerintahan desa kepada keluarga untuk mendapatkan solusi-solusi intervensi yang dapat meningkatkan status Gizi anak dalam rangka penurunan angka Stunting.

3. **KB Mobile : Kecamatan Larantuka**

   Pendekatan dilakukan oleh para Bidan dan penanggung jawab daerah binaan. Pelayanan serta pendekatan dilakukan secara langsung kepada masyarakat khususnya kepada para Pasangan Usia Subur (PUS) yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam hal ber KB untuk mendapatkan informasi terkait alat dan obat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan reproduksi dari PUS tersebut.

4. **Laskar Panji : Kecamatan Larantuka**

   Inovasi ini diciptakan untuk memantau jentik nyamuk dan menguras/ membersihkan jentik nyamuk pada tempat-tempat penampungan air secara bersama–sama dan berkala minimal

seminggu sekali, Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai DBD dan upaya pencegahannya, Mencegah terjadinya penyakit DBD dan masyarakat terbebas dari penyakit DBD, Masyarakat yang berada di rumah atau tempat-tempat umum bisa mendapatkan bubuk Abate/kaporit/ larvasida sesuai jumlah yang dibutuhkan, yang berguna untuk mecegah

nyamuk bertelur pada tempat penampungan air. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dan kerjasama dari bebagai pihak terkhusus partisipasi langsung dari masyarakat. Masyarakat bukan lagi hanya menjadi objek pelayanan kesehatan namun bisa menjadi subjek pelayanan kesehatan dengan adanya kesadaran dan pastisipasi masyarakat untuk menjaga kesehatannya secara mandiri

5. **Ina Kelu : Kecamatan Larantuka**

Ina Kelu (Inspeksi Kesehatan Lingkungan Rumah Berbasis Online) merupakan inovasi untuk kunjungan rumah dan pengambilan data online. Penggunaan Aplikasi *epicollect5 Versi 6.1.1* yang di buat dalam pengambilan data di lapangan secara cepat dan akurat berkaitan dengan kesehatan lingkungan rumah berbasis online serta memperoleh titik koordinat lokasi yang tepat dengan masalah yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Dengan demikian maka Tenaga Sanitas Lingkungan akan lebih efektif dan efisien dalam pengetahui permasalahan di masyarakat yang berkait dengan lingkungan sehingga proses pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan dengan baik yaitu dengan cara memutuskan mata rantai penyakit berbasis lingkungan.

6. **Juri Gizi (Jumat Hari Gizi) : Kecamatan Solor Barat**

Melakukan Kunjungan ke rumah keluarga sasaran untuk memantau penerapan 3 J dalam pemberian makanan dalam rumah. Pemantauan ini dilakukan setiap hari jumad, dari rumah ke rumah. Disamping itu tim pelaksana juri gizi juga terlibat aktif dalam berlansungnya pemberian PMT bagi sasaran, seperti mengantarkan makanan PMT dan memantau jalannya makan dari anak sasaran. Untuk sasaran Juri Gizi

yang bersekolah, pemantauan juri gizi, dilakukan bersama dengan guru di sekolah.

7. **Teras Baca Ile Napo : Kecamatan Solor Timur**

   Teras Baca Ile Napo adalah komunitas non profit sebagai wadah belajar dan bermain untuk anak-anak di Pulau Solor yaitu dengan membuka taman baca yang menyiapkan buku – buku bacaan yang lebih bervariasi serta menyiapkan permainan edukasi dengan sasaran anak – anak binaan yang terdiri dari TK/PAUD sampai mahasiswa dengan melibatkan relawan yaitu pera pelajar yang sudah terseleksi dan para pemuda, aktifis, guru serta orangtua binaan.

8. **SINKRON (Simpul Kreasi Nusantara) : Kecamatan Larantuka**

   SINKRON bergerak dalam bidang pendidikan, literasi, budaya, wisata, kepemudaan dan digitalisasi. Cara kerja yang didorong SINKRON adalah pelaksanaan program misalnya pada bidang literasi maka orang- orang yang dijaring memiliki pengalaman dalam dunia literasi sehingga terciptanya ruang berbagi gagasan dan karya, terciptanya kolaborasi dan networking, pengembangan kreativitas, terciptanya ruang pembelajaran dan pertukaran pengetahuan, pengembangan keterampilan social.

- **PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

1. **Minuman Herbal Serai dan Bunga Telang : Kecamatan TItehena** Memanfaatkan tanaman Serai dan bunga telang untuk meningkatkan nilai jual yaitu dengan diproduksi menjadi “Wedang Seduh Herbal Serai dan Bunga

   Telang”serta mengajak warga rwirausaha agar menambah penghasilan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2. **Pasar Barter : Kecamatan Kelubagolit**

   Menghidupkan pasar barter di setiap desa wilayah kerja Pekka Lodan Doe untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan anggota Pekka khususnya di wilayah kerja Serikat Pekka Lodan Doe dan masyarakat pada umumnya, sebagai bentuk upaya untuk membangun komunikasi,,negosiasi dan toleransi masing-masing pihak untuk membantu pihak lain serta sebagai salah

satu model pengembangan ekonomi Kerakyatan berbasis sumber daya Lokal.

3. **Kampung Creative : Kecamatan Witihama**

   Menyediakan pusat kuliner tradisional dan modern, panggung hiburan (live music, pentas seni budaya, dll) taman baca, ruang diskusi dan kajian (akan disiapkan topic secara berkala), Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja serta menjadi pusat UMKM melalui kelompok binaan sehingga mampu berdaya saing dan memiliki manfaat bagi banyak orang.

4. **Madu Hutan Flores Timur : Kecamatan Titehena**

   Dalam rangka menambah nilai jual Madu Hutan Flores maka dikemas dalam kemasan botol plastik ukuran 250 ml, diproduksi di rumah produksi Madu Hutan Flores. Para Petani madu sudah dilatih mulai proses panen, pasca panen, produksi, pelabelan dan packjing agar mendapatkan madu yang berkualitas membantu perekonomian dan meningkatkan pendapatan petani madu.

5. **Inovasi Tani Si A'O : Kecamatan Witihama**

   Memanfaatkan singkong untuk diolah dan diproduksi menjadi produk yang berbeda dan memiliki nilai jual yang berbeda dimana menghasilkan produk-produk kekinian yang siap dikonsumsi, serta menjadi media edukasi masyarakat dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran produk lokal.

6. **Pupuk Organik Cair – BIO SARI : Kecamatan Ile Mandiri**

   Pembuatan pupuk organik cair yang merupakan sebuah proses *dekomposisi/*penguraian bahan – bahan organic oleh mikroorganisme melalui proses fermentasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas produk Bio-Sari yaitu melakukan standarisasi komposisi bahan dan proses yang mengacu pada hasil uji coba, Di samping itu juga dilakukan promosi Inovasi pasca standarissi produk, baik melalui sosilisasi verbal maupun memanfaatkan media social serta kolaborasi dengan berbagai pihak yang berkompeten dalam mendukung publikasi dan replikasi Inovasi

3. Evaluasi Capaian Sasaran Strategis tahun 2023 dan Target Akhir Rencana Strategis

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2023-2026 pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur. Berikut disajikan capaian indikator kinerja sasaran terhadap target indicator sasaran dalam dokumen Rencana Strategis .

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Renstra BPPPPD

NO	Sasaran Strategis	Indiketor Kinerja	Target Akhir Periode Rensta	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Renstra
1	Meningkatnya penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD	Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	100	93,6	93,6
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	100	50	50
4	Meningkatnya kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	100	57,14	57,14
			Rata-rata capaian		75.19

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator rata – rata capaian seluruh indicator adalah sebesar 75,19 dengan kategori **Sedang.** Kondisi ini dikarenakan ada indikator yang belum mencapai target yaitu persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD dan persentase pemanfaatan hasil kelitbangan serta persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Dengan demikian diperlukan upaya tindak lanjut untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.

Hasil analisis terhadap capaian kinerja BPPPPD tahun 2023 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, maka dapat dinyatakan bahwa BPPPPD telah berhasil mencapai target (gradiasi skala intensitas kinerja tinggi). Walau demikian ada indikator yang belum mencapai target yaitu Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Keberhasilan dalam pencapaian target tersebut diatas didukung oleh beberapa faktor antara lain:

4.1 Faktor internal

1) Ketersediaan anggaran

   Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana karena terencana dengan baik termasuk kebutuhan anggarannya.

2) Kualitas dan kompetensi SDM

   Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) pada BPPPPD perangkat daerah memang dapat menjadi kendala bagi kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program kerja . Namun keterbatasan kuantitas jika didukung dengan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ternyata mampu menjadi kekuatan potensial dan menghasilkan kinerja optimal. Melalui proses pembelajaran yang terus menerus baik secara daring, berkoordinasi dan konsultasi maka BPPPPD berupaya mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk merealisasikan program kegiatan yang direncanakan dan mencapai target yang ditetapkan.

3) Koordinasi Lintas Bidang

   Upaya koordinasi lintas bidang internal BPPPPD mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditretapkan.

4) Penerapan teknologi

Perkembangan teknologi informasi tak dipungkiri sangat membantu dalam mengakselerasi pencapaian target program dan kegiatan. Penerapan aplikasi baik pada perencanaan maupun lainnya menjadi salah satu hal yang sangat membantu dalam pencapaian kinerja.

4.2 Faktor eksternal

1) Koordinasi lintas sector menjadi salah satu factor penting dalam mendukung tercapainya target kinerja.
2) Penerapan teknologi dari pusat untuk memudahkan proses perencanaan
3) Partisipasi masyarakat

   Beberapa kegiatan yang terkait langsung dengan masyarakat, khususnya kegiatan yang membutuhkan peran serta masyarakat, tentu harus didukung dengan partisipasi masyarakat itu sendiri, baik sebagai subyek maupun sasaran penerima manfaat kegiatan.

Faktor penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan antara lain:

4.1 Faktor Internal

1) Kurang konsisten dalam pelaksanaaan kegiatan sesuai dengan rencana yang termuat didalam Rencana Kegiatan Tahunan.
2) Kurangnya upaya pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan.
3) Kurangnya sosialisasi pelaksanaan inovasi.

4.2 Faktor eksternal

4) Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga manusia, menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan program-program) yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah sehingga konsistensi program belum mencapai target.
5) Kondisi lingkungan yang dinamis, dimana ada perubahan kondisi eksternal, seperti perubahan ekonomi, sosial, atau lingkungan, mempengaruhi kebijakan dan program pembangunan yang diutamakan baik dari pusat, provinsi maupun daerah .

6) Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan belum berjalan secara baik dan optimal.

Dari berbagai factor penyebab tersebut maka beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1) Membangun komitmen bersama agar selalu konsisten dalam pelaksanaaan kegiatan sesuai dengan rencana yang termuat di dalam Rencana Kerja Tahunan dengan memperhatikan skala prioritas.
2) Upaya penguatan koordinasi lintas sector dan lintas bidang dalam mendukung sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
3) Optimalkan upaya pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan program lebih efektif.
4) Peningkatan sosialisasi dan motivasi inovasi.

5. Analisis atas efisiensi penggunaaan sumber daya

Selain telah terlaksananya program, kegiatan, dan sub kegiatan, pada beberapa kegiatan juga telah dilakukan efisiensi sebagai berikut:

Tabel. 3.8

Efisiensi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Total Anggaran	Realisasi	Efisiensi	Prosentase
			(Rp)	(Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	***5,562,544,479***	***5,302,202,267***	***260,342,212***	***4.68***
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	***2,989,254,111***	*2,778,284,065*	***210,970,046***	*7.06*
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***61,000,000***	*59,506,250*	***1,493,750***	*2.45*
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***2,290,992,816***	*2,119,326,075*	***171,666,741***	*7.49*
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***7,500,000***	*7,498,700*	***1,300***	*0.02*
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***12,499,920***	*12,430,550*	***69,370***	*0.55*
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***217,087,579***	*209,964,514*	***7,123,065***	*3.28*

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Total Anggaran	Realisasi	Efisiensi	Prosentase
			(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***65,798,300***	*64,468,250*	***1,330,050***	*2.02*
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***157,609,640***	*141,016,530*	***16,593,110***	*10.53*
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***176,765,856***	*164,073,196*	***12,692,660***	*7.18*
	Perencanaan	*1,898,291,158*	*1,853,197,663*	*45,093,495*	*2.38*
2	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	*1,301,897,718*	*1,266,984,733*	*34,912,985*	*2.68*
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	***858,537,000***	*828,717,432*	***29,819,568***	*3.47*
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	***67,999,125***	*67,699,000*	***300,125***	*0.44*
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	***256,056,593***	*254,809,291*	***1,247,302***	*0.49*
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	***119,305,000***	*115,759,010*	***3,545,990***	*2.97*
3	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	***596,393,440***	*586,212,930*	***10,180,510***	*1.71*
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	***271,393,440***	*265,032,050*	***6,361,390***	*2.34*
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	***170,000,000***	*167,918,900*	***2,081,100***	*1.22*
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	***155,000,000***	*153,261,980*	***1,738,020***	*1.12*
	Penelitian dan Pengembangan	*674,999,210*	*670,720,539*	*4,278,671*	*0.63*
4	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	***674,999,210***	*670,720,539*	***4,278,671***	*0.63*
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*174,999,800*	*173,324,900*	*1,674,900*	*0.96*
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*349,999,635*	*348,710,950*	*1,288,685*	*0.37*
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*149,999,775*	*148,684,689*	*1,315,086*	*0.88*

Data efisiensi dalam hal ini merupakan data anggaran yang tidak/belum dapat dilaksanakan/direalisasikan dikarenakan sebab-sebab eksternal maupun internal. Meskipun demikian, efisiensi tersebut nilainya cukup kecil sehingga tidak mengganggu tingkat pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu diidentifikasi pada pos anggaran dan kode rekening mana saja yang masih rendah capaiannya, untuk dijadikan acuan agar di masa yang akan datang bisa diantisipasi sehingga program/kegiatan dapat direalisasikan secara lebih efisien dan efektif.

Hasil identifikasi menunjukkan efisiensi yang cukup besar terjadi pada program-program :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat sisa anggaran yang tidak direalisasikan dengan penjelasannya bahwa pengeluaran anggaran didasarkan pada kebutuhan riil berjalan tidak hanya berdasarkan anggaran yang tersedia walaupun masih memungkinkan untuk terjadinya pengeluaran. Misalnya kebutuhan pembayaran listrik, telepon dan air dikeluarkan sesuai dengan rekening pemakaian dan batas pagu
b.

yang ada dan masih terdapat sisa anggaran. Hal serupa terjadi pada penyediaan gaji dan tunjangan. Anggaran terbanyak yang tidak direalisasikan berada pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kegiatan Administrasi Keuangan Daerah. Kondisi ini juga disebabkan adanya pegawai yang mengalami pensiun pada tahun 2023.

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdapat efisiensi pada sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik dimana pada sub kegiatan ini disediakan anggaran untuk transportasi dan akomodasi tim narasumber dari Bappenas untuk melakukan pendampingan pada Konsultasi Publik RPJPD tahun 2025-2045, namun karena adanya kesibukan sehingga hanya bisa dilakukan secara daring.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Jika dirinci secara detail memang tidak seluruh kegiatan dapat dikatakan berhasil walaupun capaian kinerja secara keseluruhan memang masuk kategori Tinggi. Meskipun demikian deviasi anggaran yang tergolong kecil ini tidak berpengaruh signifikan pada rata-rata umum capaian kinerja.

a) Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran Pertama diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan seperti pada tabel berikut :

Tabel. 3.9
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target		Realisasi			
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
-1	*-2*	*-3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*			
1	Meningkatnya penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD	Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	100	93,6				**596,393,440**		**93.6**	**586,212,930**	**98.3**
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	***Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja (%)***	*100*	*596,393,440*	***93.6***	***93.6***	*586,212,930*	*98.3*
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	***Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)***	*100*	*271,393,440*	*95.2*	*95.2*	*265,032,050*	*97.7*
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)*	*1*	*40,000,000*	*1*	*100.0*	*39,366,600*	*98*
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)*	*13*	*18,000,000*	*13*	*100.0*	*17,997,600*	*100*
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (laporan)*	*1*	*15,000,000*	*1*	*100.0*	*13,527,150*	*90*
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (laporan)*	*1*	*25,000,000*	*1*	*100.0*	*24,274,900*	*97*

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target		Realisasi			
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
-1	*-2*	*-3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*			
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	*1*	*50,000,000*	*1*	*100.0*	*48,969,300*	*98*
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)*	*6*	*15,000,000*	*6*	*100.0*	*14,977,000*	*100*
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (perangkat daerah)*	*6*	*15,000,000*		-	*14,010,000*	*93*
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)*	*1*	*93,393,440*	*1*	*100.0*	*91,909,500*	*98*
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang perekonomian dan SDA (%)*	*100*	*170,000,000*	*97.78*	*97.7*	*167,918,900*	*98.78*
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi (Dokumen)*	*1*	*37,000,000*	*1*	*100.0*	*36,988,500*	*99.97*
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)*	*4*	*15,000,000*	*4*	*100.0*	*14,998,800*	*99.99*

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target		Realisasi			
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
-1	*-2*	*-3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*			
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian*	*4*	*15,000,000*	*4*	*100.0*	*14,980,900*	*99.87*
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)*	*1*	*25,000,000*	*1*	*100.0*	*23,919,650*	*95.68*
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD (Dokumen)*	*1*	*27,000,000*	*1*	*100.0*	*26,728,150*	*98.99*
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)*	*5*	*15,000,000*	*5*	*100.0*	*14,998,700*	*99.99*
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)*	*5*	*15,000,000*	*5*	*100.0*	*14,796,400*	*98.64*
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan DaerahBidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)*	*1*	*21,000,000*	*1*	*100.0*	*20,507,800*	*97.66*
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	***Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)***	*100*	*155,000,000*	*76.4705882*	*76.5*	*153,261,980*	*98.88*

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target		Realisasi			
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
-1	*-2*	*-3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*			
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah (Dokumen)*	*1*	*45,000,000*	*1*	*100.0*	*44,866,000*	*100*
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)*	*4*	*15,000,000*	*4*	*100*	*14,069,400*	*94*
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)*	*4*	*15,000,000*	*4*	*100*	*14,369,150*	*96*
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (laporan)*	*1*	*80,000,000*	*1*	*100*	*79,957,430*	*100*

Dari tabel dapat diketahui bahwa sasaran ini didukung oleh Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dimana didukung oleh kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA serta Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Selain itu tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ditunjang dengan Program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Masing-masing bidang koordinasi memiliki indicator kegiatan dimana konsistensi pada Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebanyak 95,2% (3 program mengalami pengurangan sampai pada Perubahan RKPD Tahun 2023, yang tersebar pada Dinas Pendidikan 1 program, Dinas Sosial 1 Program, dan Dinas Tenaga Kerja 1 program), Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 97,7 % (1 program pada Dinas Koperasi dan UKM) serta Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 76,5% (4 program yang tersebar pada Dinas PU-PR sebanyak 3 program dan Dinas Perumahan 1 program).

b) Analisa Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran kedua diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan seperti pada tabel berikut :

Tabel. 3.10

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target		Realisasi			
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
-1	*-2*	*-3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*			
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100				**1,301,897,718**		**81.1**	**1,266,984,733**	**97.3**
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			*1,301,897,718*			*1,266,984,733*	*97.3*
						Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	*100*		***68.54***	***68.5***		
						Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	*100*		***93.60***	***93.6***		
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	***Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)***	*3*	***858,537,000***			***828,717,432***	***96.5***
					Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)*	*2*	*47,430,000*	***1***	*50.0*	*47,429,250*	*100.0*

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target		Realisasi			
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
-1	*-2*	*-3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*			
					Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	*Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)*	*1*	*39,766,000*	***1***	*100.0*	*36,081,080*	*90.7*
					Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (berita acara)*	*2*	*84,037,000*	***2***	*100.0*	*60,984,050*	*72.6*
					Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (berita acara)*	*1*	*25,000,000*	*1*	*100.0*	*24,146,000*	*96.6*
					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab/Kota (berita acara)*	*1*	*95,170,000*	*1*	*100.0*	*94,784,352*	*99.6*
					Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (usulan)*	*1,600*	*30,614,000*	*2910*	*181.9*	*30,427,200*	*99.4*
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD (Dokumen)*	*2*	*536,520,000*	*2*	*100.0*	*534,865,500*	*99.7*
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	***Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)***	*1*	*67,999,125*	*1*	*100.0*	*67,699,000*	*99.6*
					Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)*	*1*	*67,999,125*	*1*	*100.0*	*67,699,000*	*99.6*
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	***Persentase pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (%)***	*100*	*256,056,593*	*100*	*100.0*	*254,809,291*	*99.5*

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target		Realisasi			
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
-1	*-2*	*-3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*			
					Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)*	*3*	*140,049,830*	*3*	*100.0*	*139,042,780*	*99.3*
					Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	*Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerjasama)*	*13*	*39,657,103*	*13*	*100.0*	*39,508,950*	*99.6*
					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (laporan)*	*4*	*76,349,660*	*4*	*100.0*	*76,257,561*	*99.9*
					Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	***Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)***	*2*	*119,305,000*	*2*	*100.0*	*115,759,010*	*97.0*
					Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)*	*1*	*42,000,000*	*1*	*100.0*	*39,087,330*	*93.1*
					Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)*	*1*	*77,305,000*	*1*	*100.0*	*76,671,680*	*99.2*

Partisipasi masyarakat dalam musrembang kabupaten merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Program yang mendukung partisipasi masyarakat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif yakni Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 2 indicator yakni usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%) dengan realisasi 68,45 %. dan persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%) sebesar 93,6%. Kegiatan, dan sub kegiatan yang berada pada program ini saling berkaitan dalam mendukung pencapaian kinerja karena sebagian besar merupakan tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Indikator usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%) dengan realisasi 68,45 % dapat dijelaskan bahwa jumlah usulan masyarakat yang yang diakomodir dalam APBD pada tahun 2024 sebanyak 2910 usulan masyarakat dari 4.246 usulan masyarakat yang termuat dalam aplikasi SIPD. Untuk indicator persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%) sebesar 93,6% dapat dijelaskan bahwa terdapat 125 program yang termuat dalam RPD dan yang terakomodir dalam perubahan APBD tahun 2023 sebesar 117 program.

c) Analisa Capaian Kinerja Sasaran 3

Sasaran ketiga diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan seperti pada tabel berikut :

Tabel.3.11

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target		Realisasi			
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
-1	*-2*	*-3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*			
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	50	50				**524,999,435**			**522,035,850**	**99.4**
					Penelitian dan Pengembangan							
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			*524,999,435*			*522,035,850*	
						Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	*1*	*524,999,435*	*1*	*100*	*522,035,850*	*99*
						Jumlah Inovasi yang dihasilkan (Dokumen)						
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							
					Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)*	*1*	*174,999,800*	*1*	*100*	*173,324,900*	*99*
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	***Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi (Dokumen)***	*1*	*349,999,635*	*1*	*100.0*	*348,710,950*	*100*
					Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)*	*1*	*349,999,635*	*1*	*100.0*	*348,710,950*	*100*

Capaian pada indicator didukung oleh Program Penelitian dan pengembangan Daerah. Tahun 2023 dilaksanaan 2 penelitian yang yakni kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dengan judul Studi kelayakan RS Pratama Solor serta kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dengan judul *Grand Design* Pemetaan Kawasan *Food Estate* di Kabupaten Flores Timur. Penelitian yang telah dimanfaatkan yakni Studi kelayakan RS Pratama Solor yang telah digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan DAK untuk RS Pratama Solor pada tahun 2024.

e) Analisa Capaian Kinerja Sasaran 4

Sasaran keempat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan seperti pada tabel berikut :

Tabel. 3.12
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target		Realisasi			
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
-1	*-2*	*-3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*			
1	Meningkatnya kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	100	57,14				**149,999,775**			**148,684,689**	**99.1**
					Penelitian dan Pengembangan							
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			*149,999,775*			*148,684,689*	
						Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)						
						Jumlah Inovasi yang dihasilkan (Dokumen)	*3*	*149,999,775*	*3*	*100*	*148,684,689*	*99*
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	***Jumlah Inovasi yang dihasilkan (Dokumen)***						
					Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)*	*3*	*149,999,775*	*3*	*100*	*148,684,689*	*99*

Capaian kinerja ini didukung dengan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi dengan penyelenggaraan lomba inovasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Tahun anggaran 2023, BPPPPD mengelola anggaran sebesar **Rp. 5.562.544.479** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.302.202.267.** Perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai akhir tahun 2023 sebagaimana termuat dalam Tabel 3.13

Tabel 3. 13
REALISASI BELANJA APBD 2023

No	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	Total Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
-1	*2*	*3*	*4*	
		5,562,544,479	**5,302,202,267**	**95.3**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**2,989,254,111**	**2,778,284,065**	**92.9**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*25,000,000*	*24,315,500.0*	*97.3*
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	*12,000,000*	*11,996,000.0*	*100.0*
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*12,000,000*	*11,380,250.0*	*94.8*
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*12,000,000*	*11,814,500.0*	*98.5*
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*2,230,992,816*	*2,059,336,125*	*92.3*
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*45,000,000*	*45,000,000*	*100.0*
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*15,000,000*	*14,989,950*	*99.9*
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*7,500,000*	*7,498,700*	*100.0*

No	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	Total Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
-1	2	3	4	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4,999,920	4,933,900	98.7
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7,500,000	7,496,650	100.0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,999,574	2,710,000	90.3
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28,999,325	28,997,750	100.0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,998,700	6,493,000	92.8
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39,090,000	38,645,554	98.9
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37,000,000	36,999,650	100.0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,999,980		-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25,000,000	24,970,000	99.9
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75,000,000	71,148,560	94.9
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58,798,500	57,725,000	98.2
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6,999,800	6,743,250	96.3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	600,000	40.0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56,909,640	42,816,530	75.2
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,200,000	97,600,000	98.4
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36,970,246	33,056,196	89.4
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	129,995,610	125,987,000	96.9

No	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	Total Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
-1	2	3	4	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,900,000	4,895,000	99.9
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,900,000	135,000	2.8
2	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	1,301,897,718	1,266,984,733	97.3
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	***858,537,000***	***828,717,432***	***96.5***
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	47,430,000	47,429,250	100.0
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	39,766,000	36,081,080	90.7
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	84,037,000	60,984,050	72.6
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	25,000,000	24,146,000	96.6
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	95,170,000	94,784,352	99.6
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	30,614,000	30,427,200	99.4
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	536,520,000	534,865,500	99.7
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	67,999,125	67,699,000	99.6
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	67,999,125	67,699,000	99.6
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	256,056,593	254,809,291	99.5
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	140,049,830	139,042,780	99.3
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	39,657,103	39,508,950	99.6
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	76,349,660	76,257,561	99.9
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	119,305,000	115,759,010	97.0
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	42,000,000	39,087,330	93.1
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	77,305,000	76,671,680	99.2

No	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	Total Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
-1	2	3	4	
3	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	*596,393,440*	*586,212,930*	*98.3*
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*271,393,440*	*265,032,050*	*97.7*
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*40,000,000*	*39,366,600*	*98*
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*18,000,000*	*17,997,600*	*100*
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*15,000,000*	*13,527,150*	*90*
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*25,000,000*	*24,274,900*	*97*
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*50,000,000*	*48,969,300*	*98*
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*15,000,000*	*14,977,000*	*100*
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*15,000,000*	*14,010,000*	*93*
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*93,393,440*	*91,909,500*	*98*
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*170,000,000*	*167,918,900*	*98.78*
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*37,000,000*	*36,988,500*	*99.97*
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*15,000,000*	*14,998,800*	*99.99*
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*15,000,000*	*14,980,900*	*99.87*
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	*25,000,000*	*23,919,650*	*95.68*
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*27,000,000*	*26,728,150*	*98.99*

No	Uraian Progam/Keg/sub Kegiatan	Total Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
-1	2	3	4	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15,000,000	14,998,700	99.99
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15,000,000	14,796,400	98.64
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan DaerahBidang SDA	21,000,000	20,507,800	97.66
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	155,000,000	153,261,980	98.88
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45,000,000	44,866,000	100
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15,000,000	14,069,400	94
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15,000,000	14,369,150	96
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	80,000,000	79,957,430	100
	Penelitian dan Pengembangan			
4	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	674,999,210	670,720,539	99
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	174,999,800	173,324,900	99
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	349,999,635	348,710,950	100
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	349,999,635	348,710,950	100
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	149,999,775	148,684,689	99

Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 95,3%. Hal ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana mencapai 95,0 %. Kondisi ini dikarenakan mulai dilakukan pembenahan dengan lebih konsisten terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan. Walaupun demikian masih ada anggaran yang tidak terserap

karena perubahan metode dalam pelaksanaan kegiatan misalnya dari luring menjadi daring sehingga beberapa anggaran tidak terealisasi.

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 sebagai cerminan dari hasil kinerja BPPPPD selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur tahun 2023, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing- masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja 2023.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala- kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak- pihak yang kompeten.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun penetapan kebijakan BPPPPD untuk tahun berikutnya.

Larantuka, Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur,

Apolonia Corebima, S.E, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690718 199703 2 002

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Basuki Rachmat Telp. (0383) 21056
LARANTUKA

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Apolonia Corebima, S.E,M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si

Jabatan : Penjabat Bupati Flores Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Larantuka, Oktober 2023

Pihak Kedua
Penjabat Bupati Flores Timur,

Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si

Pihak Pertama
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,

Apolonia Corebima, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690718 199703 2 002

Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD	Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	100
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100
3	Meningkatnya hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	50
4	Meningkatnya kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	100

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,053,057,671	2,989,254,111	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,716,834,085	1,301,897,718	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	628,582,715	596,393,440	APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	446,062,825	674,999,210	APBD
Jumlah		**5,844,537,296**	**5,562,544,479**	APBD

Penjabat Bupati Flores Timur,

Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si

Larantuka, Oktober 2023
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,

Apolonia Corebima, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19690718 199703 2 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Basuki Rachmat Telp. (0383) 21056
LARANTUKA

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Apolonia Corebima, S.E,M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

NIP : 19690718 199703 2 002

Pangkat : Pembina Utama Muda

Dengan ini menyatakan bahwa saya siap mengundurkan diri dari jabatan yang saya duduki saat ini terhitung tanggal 19 Oktober 2023 karena tidak mencapai target sesuai perjanjian kinerja yang telah saya perjanjikan dan hal-hal lain menurut pertimbangan Penjabat Bupati Flores Timur.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai wujud komitmen Perjanjian Kinerja.

Larantuka, 19 Oktober 2023

Mengetahui;
Penjabat Bupati Flores Timur,

Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,

Apolonia Corebima, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690718 199703 2 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Basuki Rachmat Telp. (0383) 21056
LARANTUKA

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syarif Wuran, S.Si, MT

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Apolonia Corebima, S.E, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Larantuka, Oktober 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Apolonia Corebima, SE, M.Si	Syarif Wuran, S.Si, M.T
Pembina Utama Muda	Pembina
NIP. 19690718 199703 2 002	NIP. 19710706 199402 1 001

Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 ESELON III
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan berkualitas (Target dan Sasaran jelas, terukur), Partisipatif dan tepat waktu*	*Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)*	100
		Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100
		Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan (%)	100

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Ket.
			Sebelum Revisi	Sesudah revisi	
1	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**		**1,207,666,000**	**858,537,000**	**APBD**
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	*42,430,000*	*47,430,000*	APBD
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	*51,540,000*	*39,766,000*	APBD
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	*32,557,000*	*84,037,000*	APBD
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas	*25,000,000*	*25,000,000*	APBD
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*159,500,000*	*95,170,000*	APBD
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	*33,639,000*	*30,614,000*	APBD
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*863,000,000*	*536,520,000*	APBD
2	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		**88,369,125**	**67,999,125**	**APBD**
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*88,369,125*	67,999,125	APBD
3	**Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		**273,359,660**	**256,056,593**	**APBD**
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*148,250,000*	*140,049,830*	APBD
		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama	*47,660,000*	*39,657,103*	APBD
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*77,449,660*	*76,349,660*	APBD
4	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**		**147,439,300**	**119,305,000**	**APBD**
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*58,134,300*	*42,000,000*	APBD
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*89,305,000*	*77,305,000*	APBD
	Jumlah		**1,716,834,085**	**1,182,592,718**	**APBD**

Dipindai dengan CamScanner

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,

Apolonia Corebima, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19690718 199703 2 002

Larantuka, Oktober 2023
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian,dan
Evaluasi
Pembangunan Daerah

Syarif Wuran, S.Si, MT
Pembina - IV/a
NIP. 19710706 199402 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Basuki Rachmat Telp. (0383) 21056
LARANTUKA

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Laurensius Boro Kereta, S.ST, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Apolonia Corebima, S.E, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Larantuka, Oktober 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Apolonia Corebima, SE, M.Si	Laurensius Boro Kereta, S.ST, M.Si
Pembina Utama Muda	Pembina
NIP. 19690718 199703 2 002	NIP. 19720510 199703 1 013

Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 ESELON III
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*Meningkatkan penjabaran dan konsistensi program antar dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.*	*Persentase penjabaran dan konsistensi program antar dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.(%)*	*100*

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Keterangan
			Sebelum Revisi	Sesudah revisi	
1	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**		**263,813,775**	**271,393,440**	**APBD**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*38,475,000*	*40,000,000*	*APBD*
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*19,000,000*	*18,000,000*	*APBD*
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*17,440,000*	*15,000,000*	*APBD*
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*29,318,775*	*25,000,000*	*APBD*
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*37,760,000*	*50,000,000*	*APBD*
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*19,000,000*	*15,000,000*	*APBD*
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*18,170,000*	*15,000,000*	*APBD*
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*84,650,000*	*93,393,440*	*APBD*
Jumlah			**263,813,775**	**271,393,440**	

Dipindai dengan CamScanner

Kepala Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,

Apolonia Corebima, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19690718 199703 2 002

Larantuka, Oktober 2023
Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

Laurensius Boro Kereta, SST.,M.Si
Pembina - IV/a
NIP. 19720510 199703 1 013

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Basuki Rachmat Telp. (0383) 21056
LARANTUKA

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Helena L.D Fernandez, ST. M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Apolonia Corebima, S.E, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Larantuka, Oktober 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Apolonia Corebima, S.E, M.Si	Helena L.D Fernandez, ST. M.Si
Pembina Utama Muda	Pembina
NIP. 19690718 199703 2 002	NIP. 19790128 200501 2 010

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 ESELON III
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*Meningkatkan penjabaran dan konsistensi program antar dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*	*Persentase penjabaran dan konsistensi program antar dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (%)*	*100*
2	*Meningkatkan penjabaran dan konsistensi program antar dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur*	*PPersentase penjabaran dan konsistensi program antar dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur (%)*	*100*

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Ket.
			Sebelum Revisi	Sesudah revisi	
1	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		**206,454,990**	**170,000,000**	**APBD**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*37,795,000*	*37,000,000*	APBD
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*19,000,000*	*15,000,000*	APBD
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*17,649,990*	*15,000,000*	APBD
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	*27,990,000*	*25,000,000*	APBD
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*37,920,000*	*27,000,000*	APBD
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*19,000,000*	*15,000,000*	APBD
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*19,000,000*	*15,000,000*	APBD
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	*28,100,000*	*21,000,000*	APBD
2	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		**158,313,950**	**155,000,000**	**APBD**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*37,024,000*	*45,000,000*	APBD
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*19,000,000*	*15,000,000*	APBD
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*18,450,000*	*15,000,000*	APBD

Dipindai dengan CamScanner

		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*83,839,950*	*80,000,000*	APBD
Jumlah			**364,768,940**	**325,000,000**	APBD

Larantuka, Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur,

Apolonia Corebima, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19690718 199703 2 002

Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Helena L.D Fernandez, ST. M.Si
Pembina-/IV a
NIP. 19790128 200501 2 010

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Basuki Rachmat Telp. (0383) 21056
LARANTUKA

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Leoni Deran Ola, S.E

Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Apolonia Corebima, S.E, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Larantuka, Oktober 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Apolonia Corebima, S.E, M.Si	Leoni Deran Ola, S.E
Pembina Utama Muda	Pembina
NIP. 19690718 199703 2 002	NIP. 19760912 200604 2 031

Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 ESELON III
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DA
KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan*	*Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan (dok)*	*2*
2	*Meningkatnya fungsi litbang daerah*	*Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi (%)*	*9,37*

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	
			Sebelum Revisi	Sesudah revisi
1	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**		**349,412,900**	***174,999,800***
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	*349,412,900*	*174,999,800*
2	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**			*349,999,635*
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		*349,999,635*
3	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**		**96,649,925**	**149,999,775**
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*96,649,925*	*149,999,775*
	Jumlah		**446,062,825**	**674,999,210**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,

Apolonia Corebima, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19690718 199703 2 002

Larantuka, Oktober 2023
Kepala Bidang Penelitian
dan Pengembangan

Leoni Deran Ola, S.E
Pembina - IV/a
NIP. 19760912 200604 2 031

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jln. Basuki Rahmat Telp. (0383) 21056
LARANTUKA
Kode Pos 86218

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : BPPPPD.188.4P/15/SKrt/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 Tentang RPJPD Kabupaten Flores Timur 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) yang telah di rubah dengan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2019 nomor 2);
11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 -2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Diktum KE SATU merupakan acuhan bagi unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk :

a. Perencanaan Jangka Mengengah;
b. Perencanaan Kinerja Tahunan;
c. Penyusunan Dokumen Kinerja Tahunan;
d. Pelaporan Akumtabilitas Kinerja Tahunan;
e. Evaluasi Kinerja; dan
f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat di tetapkan.

Ditetapkan : di Larantuka
Pada tanggal : 19 Oktober 2023
an. PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur,

Apolonia Corebima, S.E, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690718 199703 2 002

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPPPPD
NOMOR : BPPPDD. 188. UP/15/SKit/2023.
TANGGAL : 9 Oktober 2023.
TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023-2026

FORMAT TABEL PENETAPAN IKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERA KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	DEFINISI OPERASONAL FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP (komponen perencanaan)	Penunjang /Perencanaan	BPPPPD	Hasil Evaluasi dari Kementrian PAN RB	Aktifitas analissis yang systematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian soluasi atas masalah yang di temukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi Pemerintahm, pada komponen perencanaan kinerja. *Indikator ini merupakan IKU Kabupaten yang didukung dari komponen perencanaan.*
1.1	Meningkatnya penjabaran program RPJMD ke RKPD	Persentase penjabaran program RPJMD ke RKPD *(%)*	Penunjang /Perencanaan	BPPPPD	Dokumen RKPD tahun berkenan, Dokumen RPD atau RPJMD	Jumlah program yang diakomodir dalam RKPD tahun berkenaan dibagi jumlah program yang ada dalam RPD atau RPJMD tahun berkenaan; $\frac{\textit{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\textit{jumlah program RPJMD atau RPD yang harus dilaksanaan tahun berkenaan}} \times 100$
1.2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	Penunjang /Perencanaan	BPPPPD	Laporan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah utusan yang hadir dibandingkan dengan jumlah utusan yang diundang pada musrembang kabupaten. $\frac{\textit{Jumlah utusan yang hadir pada musremban kabupaten}}{\text{Jumlah utusan yang diundang pada musrembang kabupaten}} \times 100$

Dipindai dengan CamScanner

1.3	Meningkatnya hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	Penunjang/ Penelitian dan Pengembangan	BPPPPD	Laporan tahunan bidang Litbang	*Jumlah* kelitbangan yang ditindaklanjuti / Jumlah kelitbangan dalam *renja perangkat daerah* x 100 Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan.
1.4	Meningkatnya kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	Penunjang/ Penelitian dan Pengembangan	BPPPPD	Laporan tahunan bidang Litbang	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibandingkan dengan jumlah seluruh kebijakan inovasi yang diusulkan *Jumlah* kebijakan *inovasi yang diterapkan* / Jumlah kebijakan inovasi yang diusulkan x 100

a.n PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Apolonia Corebima, S.E, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690718 199703 2 002

Dipindai dengan CamScanner

POHON KINERJA BPPPPD

OUTCOME

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

IK : Nilai SAKIP (komponen perencanaan)

INTERMEDIATE OUTCOME

Meningkatkan penjabaran konsistensi program RPJMD ke RKPD

IK : Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke RKPD(%)

INTERMEDIATE OUTCOME

Meningkatkan penjabaran konsistensi program antar dokumen perencanaan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, Perekonomian, SDA , Infrastruktur dan Kewilayahan

IK : Persentase konsistensi program antar dokumen perencanaan bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan kewilayahan (%)

OUTPUT	OUTPUT
Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerahBidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan kewilayahan
IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (dokumen)	IK : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan kewilayahan (perangkat daerah)

OUTPUT	OUTPUT
Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi,Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah BidangBidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan kewilayahan
IK : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan kewilayahan (laporan)	IK : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan kewilayahan (laporan)

INTERMEDIATE OUTCOME

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

IK : Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)

INTERMEDIATE OUTCOME

Penyusunan dokumen perencanaan berkualitas (Target dan Sasaran jelas, terukur), Partisipatif dan tepat waktu

IK : Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)

IK : Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)

IK : Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan (%)

OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT
Tersedianya dokumen Rancangan Awal	Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan pembangunan dan telaahan dokumen perencanaan pembangunan	Terlaksananya konsultasi publik, forum perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah, musrembang kecamatan dan Musrembang Kabupaten/Kota	Terverifikasinya usulan kecamatan
IK : Jumlah Dokumen Rancangan Awal (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	IK : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (dok)	IK : Jumlah Berita Acara konsultasi publik, forum perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah, musrembang kecamatan dan Musrembang Kabupaten/Kota (berita acara)	IK : Jumlah usulan masyarakat yang diverifikasi

OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Tersedianya data / informasi untuk mendukung dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Terlaksananya kerjasama dengan dunia usaha / lembaga dalam perencanaan pembangunan
IK : Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan (dokumen)	IK : Jumlah dokumen data /informasi yang mendukung perencanaan (dokumen)	IK : Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	IK : Jumlah dunia usaha/Lembaga yang dilaksanakan kerjasama dalam perencanaan pembangunan (kerjasama)

OUTPUT
Terlaksananya penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
IK : Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (dokumen)

INTERMEDIATE OUTCOME

Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan

IK : Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)

INTERMEDIATE OUTCOME

Peningkatan kualitas hasil kelitbangan dan SDM kelitbangan

IK : Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan (dok)

OUTPUT	OUTPUT
Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dihasilkan	Tersedianya SDM kelitbangan sesuai kompetensi yang dibutuhkan
IK : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dihasilkan (dok)	IK : Jumlah SDM kelitbangan yang memiliki kesesuaian kompetensi (orang)

INTERMEDIATE OUTCOME

Meningkatkan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

IK : Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)

INTERMEDIATE OUTCOME

Penguatan fungsi kelitbangan Daerah

IK : Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi (%)

OUTPUT
Terlaksananya kegiatan inovasi daerah
IK : Jumlah inovasi yang dihasilkan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Apolonia Corebima, S.E, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690718-199703 2 002

Dipindai dengan CamScanner